

ABSTRAK

Rifqi Maulana Rachman : Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung

Perkembangan teknologi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif salah satunya adalah judi online. Tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot). Namun penegakan hukum terhadap judi online di wilayah hukum Kota Bandung belum memberikan hasil yang optimal atau tidak memberikan efek jera, dikarenakan masih saja terjadi perjudian online yakni terdapat 5 (Lima) kasus yang terjadi di 2 (dua) tahun terakhir (2019-2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori tindak pidana dengan alasan karena perjudian online merupakan suatu tindak pidana, maka perlu diketahui syarat-syarat untuk menjadikan suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, teori penegakan hukum dengan alasan jika dilihat dari angka perjudian online yang semakin meningkat maka perlu diketahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung, teori efektivitas hukum dengan alasan upaya dari pihak Kepolisian Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana perjudian online diharapkan dapat menanggulangi dari kejahatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan *yuridis empiris*. Metode analisis data secara kualitatif yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perjudian online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih saja terjadi perjudian online yang meningkat tiap tahunnya di Polrestabes Bandung. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana perjudian online yakni; Terbatasnya sarana dan prasarana; Masyarakat yang acuh dan tidak mau melapor terhadap kegiatan judi online. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung untuk menangani tindak pidana judi online adalah; Melengkapi sarana dan prasarana; Memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat.

Kata Kunci: Judi Online, Tindak Pidana, Pelaksanaan, Penegakan hukum